



ISSN 2085-2576
VOL 1-NO. 1 - MARET 2009

JURNAL MANAJEMEN INFORMATIKA

"Penggunaan Program Bantu Dalam Meningkatkan Optimalisasi *Internal Software Komputer*"
Dewi Irmawati

"Penerapan Teknologi Informasi di Perpustakaan melalui E-Library"
Iendah Meiriska

"Pemanfaatan Tipe Data Blog Dalam Pembuatan Laporan Dengan Data Foto"
Meivi Kusnandar

"Menjalankan Linux Knoppix Dengan Menggunakan Live CD"
Henny Madora

"Membangun Wireless LAN di Rumah dan Kantor Kecil"
Yusniarti

"Optimalisasi Penggunaan Microsoft Word Dalam Penulisan Karya Ilmiah"
A. Ari Gunawan Sepriansyah

"Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Asuransi Jiwa Great Eastern Palembang"
Dedy Rusdyanto dan Indri Ariyanti

"Strategi Pemasaran Untuk Konsumen Wanita"
Ida Wahyuningrum

"Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Kedisiplinan Mahasiswa Menuju Terciptanya Mahasiswa Yang Berkualitas"
Desi Apriyanti

"Kebijakan Makro ekonomi Untuk Mengatasi Inflasi"
Muhammad Noval



MARET 2009

DAFTAR ISI

1. "Penggunaan Program Bantu Dalam Meningkatkan Optimalisasi Internal Software Komputer"
Dewi Irmawati 1-17
2. "Penerapan Teknologi Informasi di Perpustakaan melalui E-Library"
Iendah Meiriska 18-27
3. "Pemanfaatan Tipe Data Blog Dalam Pembuatan Laporan Dengan Data Foto"
Meivi Kusnandar 28-30
4. "Menjalankan Linux Knoppix Dengan Menggunakan Live CD"
Henny Madora 31-38
5. "Membangun Wireless LAN di Rumah dan Kantor Kecil"
Yusniarti 39-44
6. "Optimalisasi Penggunaan Microsoft Word Dalam Penulisan Karya Ilmiah"
A. Ari Gunawan Sepriansyah 45-53
7. "Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Asuransi
Jiwa Great Eastern Palembang"
Dedy Rusdyanto dan Indri Ariyanti 54-65
8. "Strategi Pemasaran Untuk Konsumen Wanita"
Ida Wahyuningrum 66-72
9. "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Kedisiplinan Mahasiswa Menuju Terciptanya
Mahasiswa Yang Berkualitas"
Desi Apriyanti 73-79
10. "Kebijakan Makro ekonomi Untuk Mengatasi Inflasi"
Muhammad Noval 80-84

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI UNTUK MENGATASI MASALAH INFLASI

Muhammad Noval

Staf pengajar jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Email : m_noval_mi@polisriwijaya.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan makro ekonomi terdiri dari Kebijakan Moneter dan Fiskal diterapkan untuk mengatasi masalah ekonomi makro yaitu inflasi. Masalah inflasi tidak dapat dihilangkan tetapi dampaknya dapat diminimalisasi dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu perlu analisa yang akurat sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan moneter diterapkan dengan membuat kebijakan dari sektor perbankan dan kebijakan fiskal diterapkan dengan membuat kebijakan dari sektor perpajakan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi tingkat inflasi yang berlaku pada suatu negara.

Kata kunci: *Moneter, Fiskal, Makro, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Aktivitas manusia semakin hari semakin berkembang dari semua aspek kehidupan terutama aspek sosial ekonomi, karena ini menjadi kegiatan sehari-hari yang cukup vital bagi setiap individu. Pada awalnya orientasi kegiatan manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Oleh karena adanya kebutuhan yang berbeda dari manusia maka berkembanglah perekonomian dengan sistem barter. Kemudian dari sistem ini individu mempunyai kelebihan dari barang produksinya maka timbullah perekonomian dengan sistem perdagangan. Kemudian dari sistem perdagangan yang bersifat lokal berkembang menjadi sistem perdagangan yang lebih luas lagi yaitu perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal ekspor dan impor.

Dengan semakin berkembangnya aktivitas dibidang perekonomian maka timbullah berbagai macam permasalahan. Dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang perekonomian maka timbullah berbagai macam pendapat atau buah pikiran dari orang yang ahli atau berkompeten dalam bidang tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ini disebut dengan teori ekonomi dimana teori tersebut telah diuji dengan berbagai macam asumsi sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penerapannya. Maka setiap negara di dunia menerapkan berbagai macam pendapat dari para ahli tersebut yang dikenal dengan kebijakan dalam bidang perekonomian.

Kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian yang diterapkan oleh setiap negara sudah pasti tidak sama karena hal ini disebabkan dengan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang berbeda. Tetapi dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, ada suatu permasalahan yang mendapat perhatian cukup serius, yaitu masalah inflasi. Akibat yang ditimbulkan oleh masalah

tersebut mempunyai dampak yang sangat serius apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, yaitu tingkat konsumsi masyarakat yang menurun sangat tajam yang sudah pasti akan berpengaruh pada dunia usaha dan semua aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang perekonomian tersebut.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah "bagaimana mengatasi masalah inflasi dengan penerapan kebijakan makro ekonomi atau kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi?".

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk membuka dan menambah wawasan terutama bagi penulis sendiri yang berhubungan dengan kebijakan dalam bidang perekonomian dan manfaatnya yaitu dengan mengetahui kebijakan dalam bidang perekonomian tersebut agar penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

PUSTAKA

Definisi ekonomi diambil dari bahasa aslinya, Yunani, yaitu: *ekos* dan *nomos* artinya aturan-aturan dalam rumah tangga. Jadi ekonomi dapat diartikan tentang prinsip-prinsip dalam menggunakan pendapatan rumah tangga sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum kepada rumah tangga tersebut. (Sukirno Sadono, 2007).

Teori Ekonomi

Adapun definisi dari teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi, dan membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya wujud. (Sukirno Sadono,

2007).
dilakukan
guna
dalam
Putung
penger
perpajakan
(Sunar

Ind
Aa
proses
suatu
Tingla
harga
lainnya
negara
yaitu
menc
menc
hiper
Raham

Te
Se
meng
dihad
makro
dapat
a. Me

Ke
sem
tent
ada
Den
ekm
ber
kem
me
ber
kem
lah

b. Me
pe
Me
pe
ing
in
me
tu
ek
te
ne
pe
pe
tem
tem
ya
bia
per

2007). Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. (Iskandar Putong, 2002). Sedangkan kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pemasukkan perpajakan dalam satu tahun anggaran atau lebih. (Sunariyah, 2004).

Inflasi dan Faktor-faktor penyebabnya

Adapun definisi dari inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. (Sukirno Sadono, 2007). Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi ringan yaitu <10% setahun. Tingkat inflasi sedang mencapai 10%-30% setahun. Inflasi berat mencapai 30%-100% setahun dan yang terakhir hiperinflasi mencapai >100% setahun. (Prathama Rahardja, 2002).

Tujuan Kebijakan Makro Ekonomi

Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan kepada masalah-masalah makro ekonomi maka tujuan makro ekonomi dapat dibedakan menjadi empat aspek yaitu:

a. Menstabilkan kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi yang stabil dapat diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi dimana tidak terdapat jumlah pengangguran yang serius dan adanya kestabilan dari harga-harga barang. Dengan demikian pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari tiga hal berikut: tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi kedua tingkat harga-harga barang tidak mengalami kenaikan atau perubahan yang berarti dan yang ketiga adalah terdapat keseimbangan diantara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari/ke luar negeri.

b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.

Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi atau dalam bahasa inggrisnya: "*to achieve full employment without inflation*". Apabila suatu negara dapat mencapai tujuan ini dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang dapat mewujudkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran, tetapi selalu tidak dapat

mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja penuh.

c. Menghindari masalah inflasi.

Masalah inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi disebabkan sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tetapi sering sekali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi

d. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh.

Tujuan ini merupakan tujuan ekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya factor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kuantitas dan kualitasnya. Pertambahan penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja menambah ketrampilan dan kemampuan tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern. Keahlian kewirausahaan akan semakin berkembang. Berbagai perkembangan dan perbaikan ini akan menambah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang yaitu untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan inilah yang mendorong pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.

Alat pengukur kegiatan ekonomi

Beberapa data makro ekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke periode lainnya. Alat pengukur tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi adalah:

a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu atau perubahannya dari tahun ke tahun. Maka pendapatan nasional mempunyai peranan penting dalam merubah tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat kepesatan pertumbuhannya. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi melalui pendapatan nasional atau produk nasional dapat menggambarkan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu.

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (dalam persentase). Suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

c. Tingkat perubahan harga-harga

Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda. Untuk menggambarkan tingkat perubahan harga maka dibentuklah indeks harga konsumen yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.

d. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Defisit dalam neraca pembayaran yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor mengurangi tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat pengangguran akan meningkat. Alat lain yang menjadi penilai tingkat keteguhan pertumbuhan ekonomi adalah kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Apabila neraca dalam keadaan surplus dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus bertambah jumlahnya maka nilai valuta asing akan bertambah murah.

PEMBAHASAN

Masalah inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara di dunia. Masalah inflasi tersebut akan selalu ada selama adanya kegiatan perekonomian. Jadi masalah inflasi tersebut tidak dapat dihilangkan tetapi hanya dapat dikendalikan atau diminimalisasi dampak negatifnya terhadap perekonomian suatu negara. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah makro ekonomi yaitu masalah inflasi. Secara garis besar kebijakan yang diterapkan di negara kita dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kebijakan Sektor Perbankan (Moneter).

Adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam sektor perbankan yaitu mengatur penawaran uang di masyarakat dan tingkat suku bunga yang berlaku di bank-bank umum.

1.1 Kebijakan Moneter Kuantitatif Adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah Penawaran uang di masyarakat yaitu uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank - bank umum.

Kebijakan moneter kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian:

1.1.1 Politik Diskonto

Yaitu: kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Kebijakan ini diambil melalui Bank Indonesia dengan menerapkan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan kepada bank-bank umum. Bank sentral memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem bank. Salah satu caranya adalah agar bank-bank umum dapat memenuhi segala kewajibannya terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini ada dua langkah yang dijalankan oleh bank sentral. Yang pertama adalah dengan membuat petunjuk-petunjuk atau peraturan tentang pola dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank umum. Dan yang kedua adalah dengan memberikan pinjaman kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan dalam cadangan finansial yaitu di bawah standar minimum yang ditetapkan bank sentral. Ada dua bentuk bantuan yang boleh dilakukan oleh bank sentral untuk membantu bank umum, yaitu memberikan pinjaman dan membeli surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank-bank umum yang membutuhkan bantuan. Bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang tinggi likuiditasnya, seperti *treasury bill*. Bank umum yang menjual surat-surat berharga disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharga. Bank sentral juga menetapkan tingkat suku bunga pinjaman dan surat-surat berharga yang tinggi likuiditasnya yang dijual kepada bank sentral. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral tersebut disebut dengan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga bank (*bank rate*).

1.1.2 Politik Pasar Terbuka

Yaitu: kebijakan pemerintah untuk mengurangi masalah inflasi dengan mengeluarkan dan membeli surat-surat berharga. Kebijakan mengeluarkan atau membeli surat-surat berharga dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Disini Bank Indonesia mengeluarkan surat-surat berharga antara lain SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Pada waktu perekonomian sedang resesi maka bank sentral membeli surat-surat berharga untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang bertujuan untuk mendorong perkembangan

ekon
dalam
surat
meng
masy
dikun
1.1.3
Ya
perse
diper
Polim
tergan
yang
cadang
umum
pemer
dan
menpe
dimang
efektif
cadang
kebijak
memp
dimasy
1.2 Ke
Ya
dengan
1.2.1
Ya
menema
dan yang
pengawa
memama
pinjam
pemerin
tidak
tujuannya
(spread)
1.2.2 Per
Keb
dengan
pemimp
pertemu
kebijakan
pemerin
diinginkan
umum
Dengan
dapat
mengurang
mengurang
sektor ten
yang diben
2. Kebijak
Yaitu:
masalah
kebijakan
berusaha
masyarakat
persentase

ekonomi. Sebaliknya apabila ekonomi sedang dalam keadaan inflasi maka bank sentral menjual surat-surat berharga yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga tingkat inflasi dapat dikurangi.

1.1.3 Cadangan Minimum Perbankan

Yaitu kebijakan pemerintah dengan mengubah persentase cadangan minimum yang wajib dipenuhi oleh bank umum. Efektif atau tidaknya Politik diskonto dan Politik pasar terbuka sangat tergantung kepada kelebihan cadangan minimum yang dimiliki oleh bank umum. Apabila cadangan minimum yang dimiliki oleh bank umum lebih besar dari yang ditetapkan oleh pemerintah maka kebijakan politik pasar terbuka dan diskonto tidak akan efektif untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Agar kedua kebijakan tersebut efektif maka bank sentral harus mengubah cadangan minimum bagi bank umum sehingga kebijakan yang diterapkan dapat efektif mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

1.2 Kebijakan Moneter Kualitatif

Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara:

1.2.1 Pengawasan Pinjaman Secara Selektif

Yaitu kebijakan pemerintah dengan menentukan jenis pinjaman yang harus ditambah dan yang harus dikurangi. Tujuan utama dari pengawasan pinjaman secara selektif adalah untuk memastikan bank-bank umum memberikan pinjaman dan investasi yang diinginkan oleh pemerintah agar pinjaman dan investasi tersebut tidak terkonsentrasi pada satu sector saja tujuannya adalah untuk mengurangi resiko (*spread risk*).

1.2.2 Pembujukan Moral

Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral dengan mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin bank umum tersebut. Dalam pertemuan tersebut bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Dengan melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk mengurangi/menambah jumlah pinjaman atau mengurangi/ menambah pinjaman-pinjaman untuk sektor tertentu atau merubah tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh bank-bank umum.

2. Kebijakan Sektor Perpajakan (Fiskal).

Yaitu: Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dengan cara menerapkan kebijakan disektor perpajakan. Disini pemerintah berusaha mempengaruhi daya beli (*buying power*) masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan persentase perpajakan.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan Sektor Penawaran.

Yaitu: kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang produksi dengan harga yang lebih murah dengan mutu yang baik. Salah satu kebijakan dari segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (*income policy*), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan gaji pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan ini akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan dari segi penawaran lebih menekankan kepada:

- Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja yaitu dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi.
- Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya dengan cara pemerintah akan memproduksinya dengan cara pemerintah akan memberi insentif misalnya: dengan memberikan pengurangan pajak atau pembebasan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk mengadakan penelitian dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang dihasilkan.

Sebelum menerapkan kebijakan makro ekonomi pemerintah harus dapat menganalisa dengan tepat penyebab utama inflasi. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif untuk mengatasi masalah inflasi. Kalau kita analisa dengan tepat masalah inflasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga solusi yang ditawarkan dan diterapkan oleh pemerintah benar-benar menjadi obat untuk mengatasi masalah inflasi. Karena apabila kebijakan yang diterapkan pemerintah terlalu berlebihan maka akan menjadi bumerang yaitu justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kebijakan yang diterapkan haruslah dengan dosis yang tepat.

PENUTUP

Masalah makro ekonomi yaitu masalah inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh setiap negara. Penyebab masalah inflasi tersebut dalam bidang perekonomian sangat kompleks sehingga dibutuhkan analisa yang tepat untuk mengetahui faktor penyebab permasalahan tersebut sehingga dapat menerapkan solusi tepat. Solusi yang diterapkan oleh setiap negara sudah

pasti berbeda satu sama lain hal ini disebabkan faktor penyebab inflasi juga berbeda.

Ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu pertama, kebijakan yang berhubungan dengan sektor perbankan (moneter) yaitu dengan mengendalikan tingkat suku bunga perbankan, kedua, kebijakan yang berhubungan dengan sektor perpajakan (fiskal) yaitu menaikkan atau menurunkan persentase pajak yang berlaku di masyarakat dan yang ketiga, kebijakan yang berhubungan dengan sektor dari segi penawaran yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mengendalikan tingkat upah yang berlaku di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Putong, Iskandar, 2002, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahardja, Prathama, 1997, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2002, *Pengantar Ekonomi Mikro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2002 *Pengantar Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunariyah, 2004, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.